

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)



## 2020



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA YOGYAKARTA**

Telp. (0274) 514448, 515865, 515866, 562682

E Mail: [dukcapil@jogjakota.go.id](mailto:dukcapil@jogjakota.go.id).

WEB SITE: [www.kependudukan.jogjakota.go.id](http://www.kependudukan.jogjakota.go.id)

# KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2020 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Tahun 2020 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi atas penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Di era saat ini perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan suatu kebutuhan yang tidak terhindarkan. Dalam kondisi sosial masyarakat yang sangat dinamis, sikap yang harus tetap dikembangkan adalah menjaga kepercayaan publik melalui kinerja yang dilaksanakan secara transparan dan akuntabel untuk memberikan *public good services* serta pencapaian kinerja yang ditargetkan. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan, sekaligus sebagai bahan untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan sehingga dapat mendukung kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Yogyakarta, 4 Januari 2021

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kota Yogyakarta



Dra. CRISTINA LUCY IRAWATI

## **Ikhtisar Eksekutif**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020 ini memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan prestasi kinerja yang dihasilkan di tahun 2020, dapat digambarkan sebagai berikut:

Sasaran Tertib administrasi kependudukan masyarakat meningkat dengan indikatornya Indeks tertib administrasi kependudukan yang diukur dengan formula indeks 50% penerbitan dokumen kependudukan + 50% penerbitan dokumen pencatatan sipil.

Capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2020 adalah 101,80%

Di luar indikator sasaran strategis, pencapaian kinerja juga ditunjukkan oleh pencapaian target terkait dengan Persentase pemanfaatan data kependudukan dimana capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2020 adalah 107,14%

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta ke depan, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen administrasi kependudukan
2. Meningkatkan kemudahan akses pelayanan dokumen administrasi kependudukan,
3. Meningkatkan kerja sama layanan adminduk dengan stakeholder terkait.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

# Daftar Isi

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>IKTHISAR EKSEKUTIF</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Struktur Organisasi .....	1
1.2 Fungsi dan Tugas.....	2
1.3 Isu-Isu Strategis.....	3
1.4 Kepegawaian .....	4
1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana.....	6
1.6 Keuangan .....	10
1.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .....	13
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b> .....	<b>15</b>
2.1 Perencanaan Strategis .....	15
2.1.1. Visi dan Misi Kepala Daerah .....	15
2.1.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah .....	17
2.1.3 Strategi, Program dan Kegiatan .....	17
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 .....	18
2.3. Rencana Anggaran Tahun 2020.....	19
2.3.1 Target Belanja .....	19
2.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis .....	19
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>20</b>
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2020 .....	20
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis .....	21
3.3 Realisasi Anggaran .....	26
3.4 Akuntabilitas Anggaran .....	27
3.5 Inovasi.....	27
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>38</b>
4.1 Kesimpulan .....	38
4.2 Rencana Tindak Lanjut.....	38
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	<b>39</b>

# Daftar Tabel

Tabel 1.1	Komposisi Pegawai Menurut Jabatan Struktural dan Non Struktural Tahun 2020.....	4
Tabel 1.2	Daftar Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan dan Golongan Per 31 Desember 2020.....	6
Tabel 1.3	Daftar Jenis Barang dan Kondisinya Per 31 Desember 2020 .....	7
Tabel 1.4	Jumlah Alokasi Anggaran Belanja.....	10
Tabel 1.5	Anggaran Belanja Tidak langsung Th. 2016-2020.....	11
Tabel 1.6	Anggaran Belanja Langsung Th. 2020 .....	12
Tabel 2.1	Ringkasan Visi Misi RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022.....	16
Tabel 2.2	Sasaran Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2017–2022.....	17
Tabel 2.3.	Strategi, Program dan Kegiatan .....	17
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Tahun 2020 .....	18
Tabel 2.5	Target Belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta APBD Perubahan Tahun 2020 .....	19
Tabel 2.6	Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis.....	19
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja .....	20
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Tahun 2020 .....	21
Tabel 3.3	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan.....	21
Tabel 3.4	Perhitungan Kinerja berdasarkan Formulasi Indikator Capaian Tahun 2020 .....	22
Tabel 3.5	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020.....	23
Tabel 3.6	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Pemanfaatan Data Kependudukan Tahun 2020 .....	23
Tabel 3.7	Capaian Indikator Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk .....	24
Tabel 3.8	Capaian Indikator Program Pelayanan Pencatatan Sipil .....	24
Tabel 3.9	Capaian Indikator Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan .....	24
Tabel 3.10	Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2020 .....	26
Tabel 3.11	Analisis Efisiensi .....	27

# Daftar Gambar

Gambar 1.1	Struktur Organisasi .....	2
Gambar 1.2	Peta Kota Yogyakarta.....	4
Gambar 1.3	Komposisi Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020.....	4
Gambar 1.4	Komposisi Pegawai Jenis Kelamin menurut Jabatan Struktural Tahun 2020 .....	5
Gambar 1.5	Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan.....	6
Gambar 1.6	Sarana Prasarana Pelayanan.....	10
Gambar 1.7	Jumlah Alokasi AnggaranBelanja Th. 2016 – 2020.....	11
Gambar 1.8	Komposisi Anggaran Belanja Tidak Langsung 2020.....	12
Gambar 1.9	Komposisi Anggaran Belanja Langsung Th 2020 .....	13
Gambar 3.1	Perkembangan Capaian Kinerja Sasaran dibanding Target .....	23
Gambar 3.2	Persentase Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran.....	27
Gambar 3.3	Kegiatan Jemput Bola.....	28
Gambar 3.4	Perekaman KTP El Penduduk yang Mengalami Keterbatasan Fisik <i>door to door</i> .....	28
Gambar 3.5	Pelayanan Drive Thru Cetak KTP-EL .....	29
Gambar 3.6	Informasi Layanan On-line .....	30
Gambar 3.7	Informasi ke Masyarakat .....	31
Gambar 3.8	Layanan Administrasi Kependudukan di <i>Jogja Smart Service</i> .....	32
Gambar 3.9	Layanan 3 in 1 Akta Perkawinan.....	33
Gambar 3.10	Proses Layanan 3 in 1 Akta Kelahiran .....	33
Gambar 3.11	Proses Layanan 3 in 1 Akte Kematian.....	34
Gambar 3.12	Pengumuman Pelayanan Publik.....	35
Gambar 3.13	Sosialisasi di Media Elektronik.....	36
Gambar 3.14	Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan.....	36
Gambar 3.15	Penghargaan WBK .....	37

# BAB 1

# PENDAHULUAN

## **Bab 1 Berisi :**

1. *Struktur Organisasi*
2. *Fungsi dan Tugas*
3. *Isu Strategis*
4. *Keadaan Pegawai*
5. *Keadaan Sarana dan Prasarana*
6. *Keuangan*
7. *Sistematika LKj IP*

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2020 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2020 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta
2. Mendorong Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

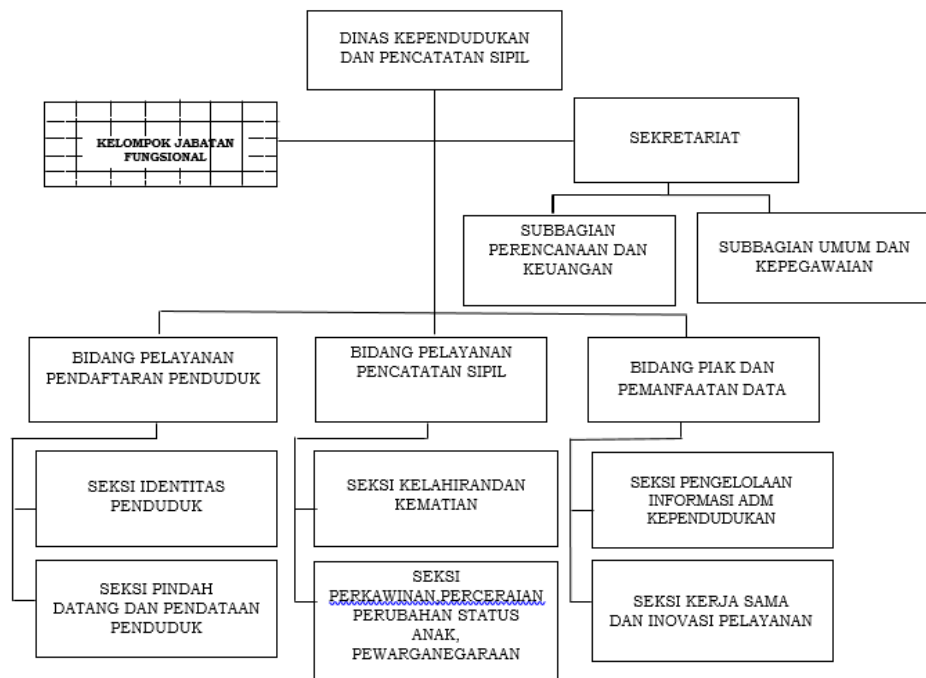
## **1.1 Struktur Organisasi**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta



merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:

### STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENACATATAN SIPIL KOTA YOGYAKARTA



Gambar 1.1 Struktur Organisasi

### 1.2 Tugas dan Fungsi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Adapun Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta menetapkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kependudukan dan pencatatan sipil,
3. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil,



4. Pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
5. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

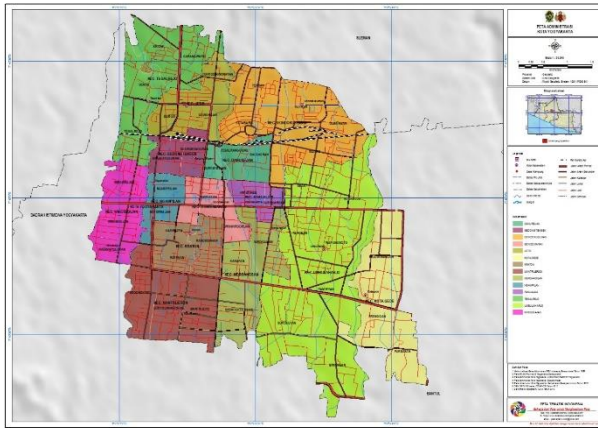
Adapun landasan hukum penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- b. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- d. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
- e. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- f. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- g. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

### **1.3 Isu-isu Strategis**

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, antara lain sebagai berikut:

1. Perlunya Percepatan pelayanan administrasi kependudukan dengan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait
2. Pelayanan kependudukan go digital
3. Pemanfaatan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundangan
4. Dinamika penduduk Kota Yogyakarta berkaitan dengan karakteristik kota yang bersifat “terbuka dan tempat tujuan untuk berbagai kepentingan”



Gambar 1.2 Peta Kota Yogyakarta

Kota Yogyakarta dengan luas wilayah 32,5 km<sup>2</sup> berpenduduk 414.704 jiwa pada tahun 2020 merupakan kota yang bersifat “terbuka dan memiliki berbagai potensi kewilayahan yang menarik” sehingga tempat tujuan migrasi penduduk dengan berbagai kepentingan seperti bekerja, menempuh pendidikan dan lain-lain.

Dinamika pergerakan penduduk yang cukup tinggi merupakan tantangan tersendiri dalam upaya mewujudkan tertib administrasi kependudukan.

#### 1.4 Kepegawaian

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta memiliki sumberdaya manusia dalam jumlah dan kapasitas yang terbatas.



Gambar 1.3. Komposisi Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020

Pada akhir tahun 2020 terdapat 40 orang pegawai terdiri atas PNS sebanyak 36 orang dan Tenaga Bantuan (Naban) sebanyak 6 orang. Sedangkan bila dilihat berdasarkan jenis kelaminnya sebagian besar merupakan pegawai laki-laki yaitu sebanyak 70% dan sisanya sebanyak 30% merupakan pegawai perempuan. Pegawai Laki laki 27 orang, dan wanita sebanyak 12 orang.

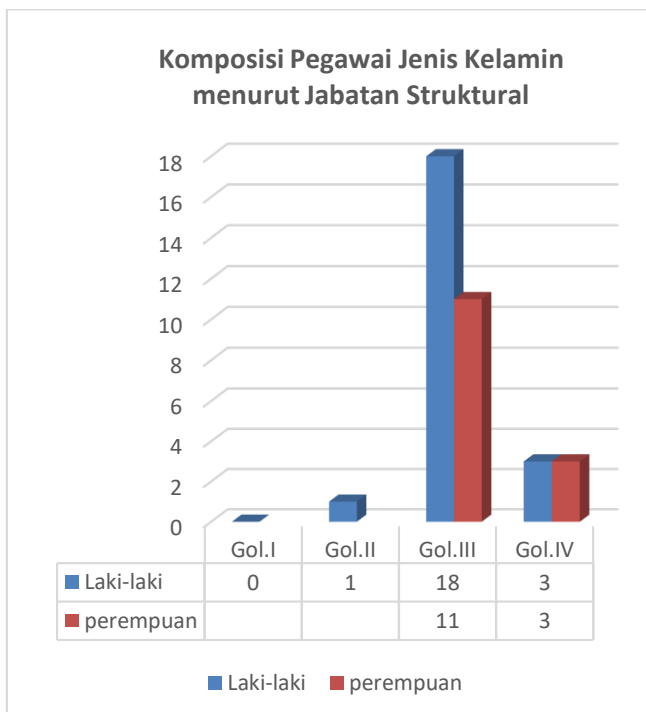
Dari seluruh jumlah pegawai tersebut sebanyak 13 orang pejabat struktural dan 21 orang staf fungsional umum, 2 orang fungsional tertentu dan 6 tenaga bantuan dengan komposisi 36,11% pejabat struktural dan 63,89% non struktural.

Tabel 1.1 Komposisi Pegawai Menurut Jabatan Struktural dan Non Struktural Tahun 2020

No	Jabatan	Jumlah	Status Pengisian Jabatan
1	Kepala	1 orang	Ada
2	Sekretaris	1 orang	Ada
3	Kepala Bidang	3 orang	
	• Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Ada

No	Jabatan	Jumlah	Status Pengisian Jabatan
	• Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil		Ada
	• Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data		Ada
4	Kepala Sub Bagian	2 orang	
	• Kepala Sub Bag. Umum dan Kepegawaian		Ada
	• Kepala Sub Bag. Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan		Ada
5	Kepala Seksi	6 orang	
	• Kepala Seksi Identitas penduduk		Ada
	• Kepala Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk		Ada
	• Kepala Seksi Pelayanan Kelahiran dan Kematian		Ada
	• Kepala Seksi Pelayanan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan		Ada
	• Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Ada
	• Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan		Ada
6	Staf Fungsional Umum	22 orang	Ada
7	Staf Fungsional Tertentu	2 orang	Ada
8	Tenaga Bantuan (Naban)	6 orang	Ada

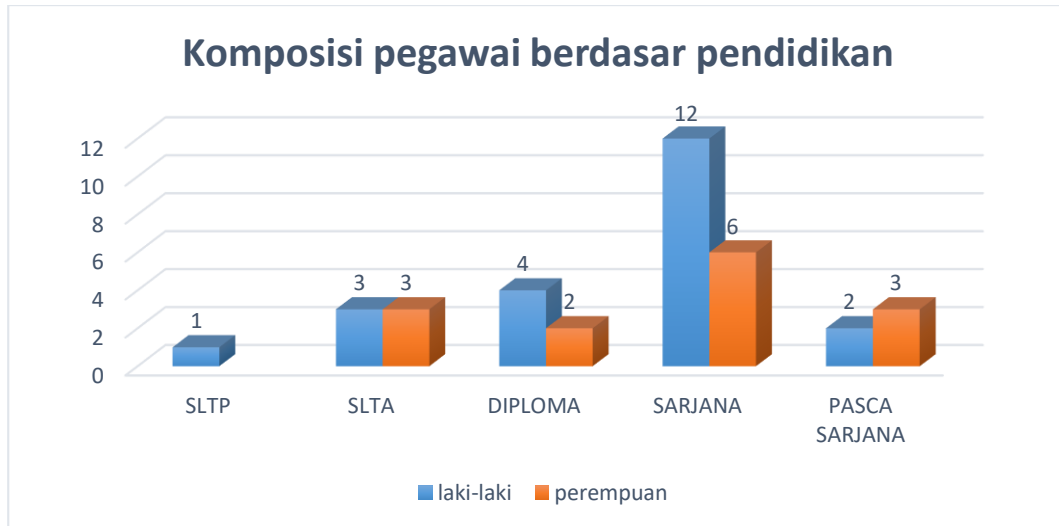
Sumber: Sistem Informasi Kepegawaian, 2020



Gambar 1.4 Komposisi Pegawai Jenis Kelamin menurut Jabatan Struktural Tahun 2020

Bila dilihat berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa pegawai laki-laki lebih banyak menduduki jabatan struktural dibanding perempuan. Sedangkan pada tingkat eselon untuk tahun 2020 menunjukkan bahwa komposisi perempuan yang menduduki jabatan hampir sama dengan pegawai laki-laki. Beberapa upaya telah dilakukan untuk mendorong pengembangan karir perempuan sehingga semakin terbuka kesempatan bagi perempuan untuk menduduki posisi strategis untuk berperan lebih luas dalam pengambilan kebijakan.

Bila pegawai dipilah menurut pendidikan dan jenis kelamin menunjukkan bahwa pendidikan SLTP sampai dengan pendidikan tinggi S1 masih didominasi oleh laki-laki, sedangkan pada tingkat pendidikan tinggi S2 jumlah laki-laki lebih sedikit disbanding perempuan.



Gambar 1.5. Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan

Sedangkan apabila data dipilah menurut pendidikan pada tiap golongan menunjukkan bahwa PNS Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagian terbesar adalah golongan III dengan pendidikan S1 sebanyak 45,16% Rincian detail pegawai menurut pendidikan dan golongan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.2 Daftar Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan dan Golongan Per 31 Desember 2020

PENDIDIKAN	Naban	Gol I	Gol II	GOL III	GOL IV	Jumlah
SLTP	0	0	0	0	0	0
SLTA	4	0	1	6	0	11
DIPLOMA	1	0	0	7	0	8
SARJANA	1	0	0	15	1	17
PASCA SARJANA	0	0	0	1	5	6
Jumlah	6	0	1	29	6	42

Sumber: Sistem Informasi Kepegawaian, 2020

### 1.5 Keadaan Sarana Prasarana

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta memiliki beberapa sarana dan prasarana pendukung sebagaimana terinci pada tabel berikut:

Tabel 1.3 Daftar Jenis Barang dan Kondisinya Per 31 Desember 2020

No	Jenis Barang	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Genset	16	-	16
2	Pompa Air	2	-	2
3	Mobil	6	-	6
4	Sepeda Motor	23	-	23
5	Sepeda	1	-	1
6	Mesin Ketik	10	-	10
7	Almari Besi	2	-	2
8	Rak Besi Siku	51	-	51
9	Rool Pack/ Rotary filling	4	-	4
10	Rak Kayu	25	-	25
11	Filling Cabinet	35	-	35
12	Brankas	3	-	3
13	Almari lereg kaca	16	-	16
14	Almari kayu	20	-	20
15	Whiteboard	1	-	1
16	Mesin Presensi	3	-	3
17	Layar OHP	1	-	1
18	LCD Proyektor	3	-	3
19	Meja rapat	2	-	2
20	Kursi Komputer	10	-	10
21	Kursi Tunggu	16	-	16
22	Meja Komputer	7	-	7
23	Kursi Tamu	4	-	4
24	Meja Kerja	46	-	46
25	Meja Knap	17	-	17
26	Jam Dinding	8	-	8
27	Vacum Cleaner	3	-	3
28	Air Purifier	1	-	1
29	AC	15	-	15
30	Exhouse Fan	2	-	2
31	Televisi	4	-	4
32	Sound System	3	-	3
33	UPS PC	32	-	32
34	Lambang Garuda	1	-	1
35	Gambar Presiden, Wakil Presiden	2	-	2
36	Tiang Bendera	1	-	1
37	Dispenser	3	-	3
38	Monitor PC	21	-	21
39	PC	45	-	45
40	Laptop	11	-	11
41	Scanner	17	-	17
42	Server SIAK	1	-	1
43	Sarana LAN	1	-	1
44	Sarana LAN dengan modem	14	-	14
45	Printer	133	-	133
46	Meja Kerja 1 Biro	6	-	6

No	Jenis Barang	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
47	Kursi Sandaran Tinggi	3	-	3
48	Kursi Sandaran Rendah	7	-	7
49	Kursi rapat lipat	119	-	119
50	Kursi rapat susun	5	-	5
51	Kursi staf	43	-	43
52	Camera Digital	29	-	29
53	Adaptor Camera	15	-	15
54	Tripod	14	-	14
55	Pemotong KTP ELEKTRONIK	28	-	28
56	Mesin Laminating	36	-	36
57	Lamipacker	14	-	14
58	Pesawat Telepon	10	-	10
59	Kipas Angin	23	-	23
60	Vertical Blind	1	-	1
61	Karpet	1	-	1
62	Bangunan Gedung	1	-	1
63	Buku Perpustakaan	84	-	84
64	Kursi Roda	1	-	1
65	Trolley barang	1	-	1
66	Toolkit	2	-	2
67	Rak multiguna	7	-	7
68	Alat semprot sprayer	1	-	1
69	Media edukasi	2	-	2
70	Papan informasi	1	-	1
71	Tenda tunggu	2	-	2
72	Kursi plastik	20	-	20
73	Dehumidifier	1	-	1
74	Tangga alumunium	3	-	3
75	Tempat koran	1	-	1
76	Tempat sampah	2	-	2
77	Sekat meja	1	-	1
78	Mesin faximile	1	-	1
79	Thermometer tembak	3	-	3
80	Thermo hygrometer	2	-	2
81	HT	1	-	1

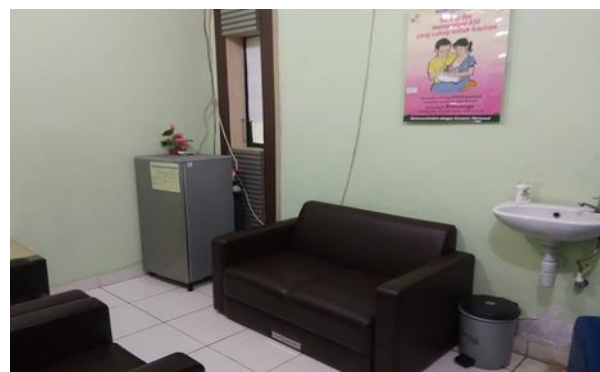
Sumber: Buku Inventaris Barang, 2020

Dari sarana prasarana yang ada sebagian besar dalam kondisi yang baik dan digunakan untuk :

1. Pendukung operasional administrasi perkantoran
2. Pendukung operasional layanan penyelenggaraan administrasi kependudukan antara lain :
  - Counter Layanan
  - Nomor Antrian Elektronik
  - Ruang Laktasi
  - Kids Zone (Ruang bermain Anak)
  - Fasilitas Difabel



- Fasilitas Informasi dan Pengaduan
- Ruang Kearsipan
- Pelayanan Keliling







Gambar 1.6 Sarana Prasarana Pelayanan

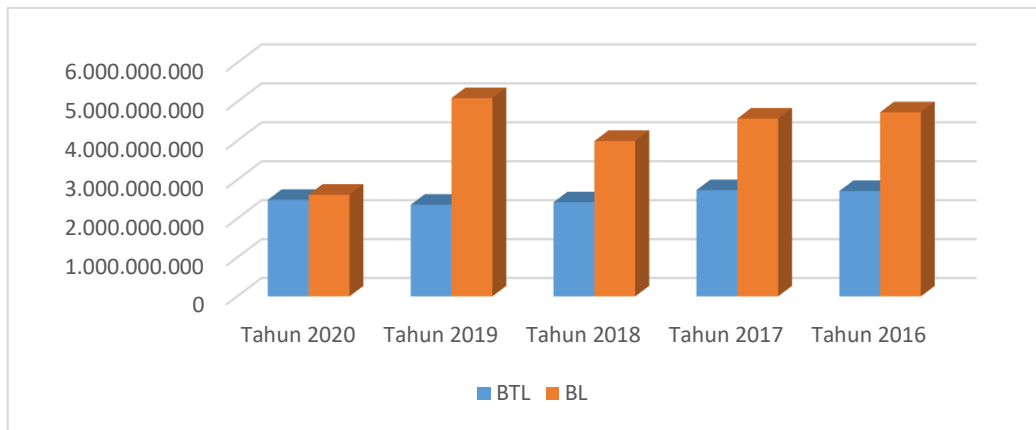
## 1.6 Keuangan

Dalam rangka pencapaian target kinerja tahun 2020 Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Yogyakarta didukung Anggaran Belanja Daerah. Total Anggaran Belanja Daerah tahun 2020 sebesar Rp5.101.826.500,- dengan perbandingan antara belanja langsung dan belanja tidak langsung 51,29 % dibanding 48,71 %

Tabel 1.4 Jumlah Alokasi Anggaran Belanja

Jenis Belanja	Anggaran Tahun 2020 (Rp)	Anggaran Tahun 2019 (Rp)	Anggaran Tahun 2018 (Rp)	Anggaran Tahun 2017 (Rp)	Anggaran Tahun 2016 (Rp)
Belanja Tidak Langsung (BTL)	2.484.940.000	2.358.339.134	2,423.245.356	2,734.348.514	2.711.552.693
Belanja Langsung (BL)	2.616.886.500	5.096.585.000	3.996.592.050	4,572.677.971	4.732.011.520
<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>5.101.826.500</b>	<b>7.454.924.134</b>	<b>6.419.837.406</b>	<b>7,307.026.485</b>	<b>7.443.564.213</b>

Sumber: DPPA, 2020



Gambar 1.7. Jumlah Alokasi Anggaran Belanja Th. 2016 - 2020

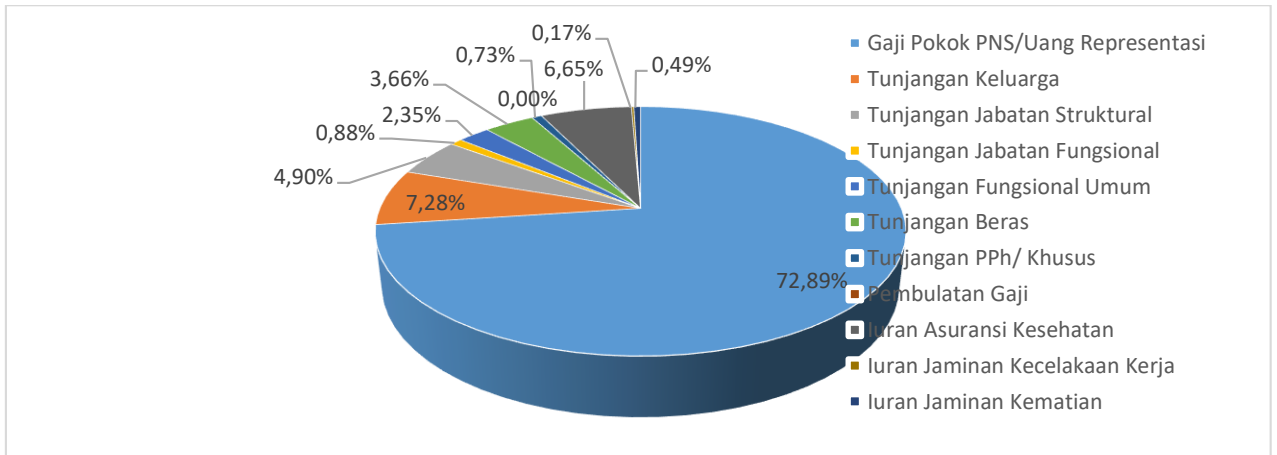
### Belanja Tidak Langsung

Sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 besaran anggaran belanja tidak langsung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil cenderung fluktuatif mengikuti kebutuhan Perangkat Daerah dan peraturan serta kebijakan yang berlaku di Pemerintah Kota Yogyakarta. Rincian alokasi penggunaan anggaran dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.5 Anggaran Belanja Tidak langsung Th. 2016-2020

No	Rincian	Anggaran				
		2020	2019	2018	2017	2016
1	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.811.340.804	1.774.303.322	1.845.394.090	2.094.072.540	2.094.072.540
2	Tunjangan Keluarga	180.903.084	189.036.376	189.575.573	194.851.874	194.851.874
3	Tunjangan Jabatan Struktural	121.759.750	129.319.750	128.045.750	151.438.625	151.438.625
4	Tunjangan Jabatan Fungsional	21.936.000	33.525.000	15.498.000	22.500.000	
5	Tunjangan Fungsional Umum	58.332.750	58.332.750	66.368.750	71.355.375	71.355.375
6	Tunjangan Beras	90.858.132	89.967.366	93.530.430	111.345.750	111.345.750
7	Tunjangan PPh/ Khusus	18.028.688	12.635.487	11.957.940	19.816.790	29.213.270
8	Pembulatan Gaji	26.841	27.888	25.901	31.756	31.756
9	Iuran Asuransi Kesehatan	165.349.210	54.387.341	52.060.352	59.243.245	
10	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	4.226.141	4.575.979			
11	Iuran Jaminan Kematian	12.178.600	12.227.875	20.788.570	9.692.559	
	<b>Jumlah</b>	<b>2.484.940.000</b>	<b>2.358.367.022</b>	<b>4.423.245.356</b>	<b>2.734.348.514</b>	<b>2.711.552.693</b>

Distribusi persentase terbesar alokasi anggaran belanja tidak langsung adalah untuk membayar gaji pegawai seperti digambarkan dalam grafik sebagai berikut ini:



Gambar 1.8 Komposisi Anggaran Belanja Tidak Langsung 2020

### Belanja Langsung

Komposisi Anggaran Belanja Langsung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

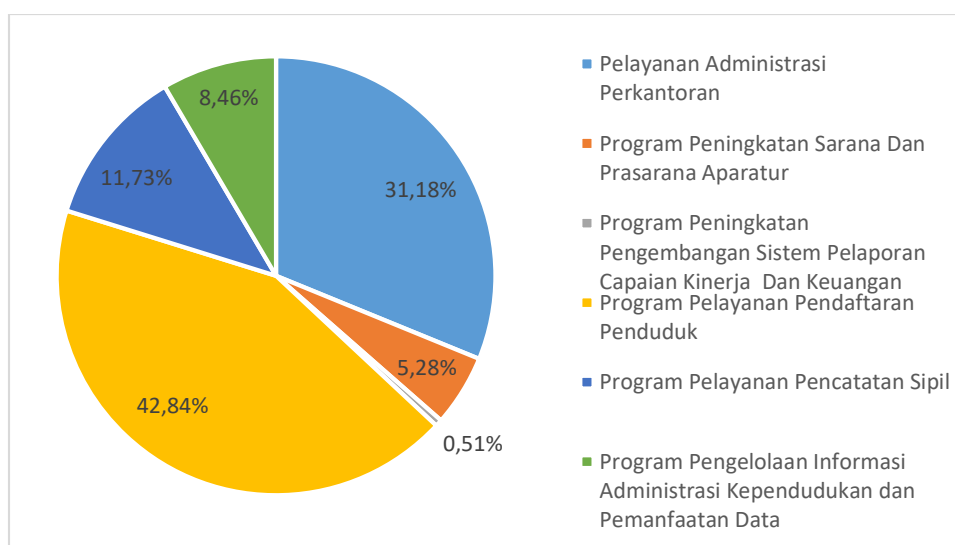
Tabel 1.6 Anggaran Belanja langsung Th. 2020

No	Program / Kegiatan	Anggaran
<b>1.</b>	<b>Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>815.885.500</b>
	Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	83.812.000
	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan kantor	732.073.500
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur</b>	<b>138.110.000</b>
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan kantor	39.675.000
	Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas / Operasional	98.435.000
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan</b>	<b>13.356.000</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan capaian Kinerja dan Keuangan	13.356.000
<b>4</b>	<b>Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>1.120.957.000</b>
	Pelayanan Identitas Penduduk	1.053.309.000
	Pelayanan Pindah datang dan pendataan Penduduk	67.648.000
<b>5</b>	<b>Program Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	<b>307.081.000</b>
	Pelayanan Kelahiran dan Kematian	241.809.000
	Pelayanan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan	65.272.000

No	Program / Kegiatan	Anggaran
6	<b>Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data</b>	221.497.000
	Kerjasama dan Inovasi Pelayanan	58.900.000
	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	162.597.000
	<b>Jumlah Anggaran Belanja Langsung</b>	<b>2.616.886.500</b>

Sumber: DPPA, 2020

Berikut grafik untuk belanja langsung Tahun 2020



Gambar 1.9 Komposisi Anggaran Belanja Langsung Th 2020

### 1.7 Sistematis Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif memuat:

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapaitujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya;
2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

#### BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKjIP/manfaat LKjIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, Potensi yang menjadi ruang lingkup PD dan Sistematika penulisan LKj IP.

## BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan dan perjanjian kinerja.

Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepada Daerah.

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

Disajikan pula Inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat daerah. Inovasi dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada maupun yang sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas

## BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

## LAMPIRAN

## BAB 2

# PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

### *Bab 2 Berisi :*

- 1. Perencanaan Strategis*
- 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2020*
- 3. Rencana Anggaran Tahun 2020*
- 4. Instrumen Pendukung*

### **2.1 Perencanaan Strategis**

Memasuki Tahun 2020, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta merupakan manifestasi komitmen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta yang tertuang dalam RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022.

Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (2012-2017).

RPJMD Pemerintah Kota Yogyakarta merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan sesuai Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 ditetapkan melalui Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 52 tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 44 tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2017-2022.

#### **2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah**

Visi berkaitan pandangan ke depan mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Secara teknis visi merupakan rumusan umum untuk mewujudkan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu.

Tabel 2.1 Ringkasan Visi Misi RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022

Visi	Misi	Sasaran Daerah
Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni Dan Pusat Pelayanan Jasa Yang Berdaya Saing Kuat Untuk Keberdayaan Masyarakat Dengan Berpijak Pada Nilai Keistimewaan	1. Meningkatkan Kesejahteraan dan Keberdayaan Masyarakat	1. Kemiskinan Masyarakat Menurun
		2. Keberdayaan Masyarakat Meningkat
		3. Ketahanan Pangan Masyarakat Meningkat
	2. Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta	1. Ketimpangan Pendapatan Antar Penduduk Menurun
		2. Pertumbuhan Ekonomi Meningkat
	3. Memperkuat moral, etika, dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta	1. Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun
	4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial, dan budaya	1. Kualitas pendidikan meningkat
		2. Harapan hidup masyarakat meningkat
		3. Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat
	5. Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan	1. Kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat
		2. Kualitas lingkungan hidup meningkat
	6. Membangun sarana dan prasarana publik dan permukiman	1. Infrastruktur wilayah meningkat
	7. Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih	1. Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat

Sumber: RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022

Berangkat dari visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah tahun 2017 – 2022 tersebut diatas maka sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk membantu Walikota Yogyakarta dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta mendukung pencapaian Sasaran Pemerintah daerah pada Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat dengan indikator capaian sasaran “Tercapainya Indeks tertib administrasi kependudukan”



## 2.1.2 Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah

### Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Mengacu kepada visi dan misi Pemerintah daerah yang telah ditetapkan, maka tujuan jangka menengah yang hendak dicapai atau dihasilkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta selama 5 tahun anggaran dari Tahun 2017-2022 adalah

“Meningkatkan tertib administrasi kependudukan bagi masyarakat”

### Sasaran Strategis

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Sasaran Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2017–2022

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA INDIKATOR SASARAN	TARGET SASARAN					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tertib administrasi kependudukan masyarakat meningkat	Indeks tertib administrasi kependudukan	50% penerbitan dokumen kependudukan + 50% penerbitan dokumen pencatatan sipil	93,52%	92,20%	92,79%	98,00%	98,63%	99,25%

Sumber: Review RENSTRA Dindikcapil, 2020

## 2.1.3 Sasaran Strategis, Program dan Kegiatan

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran, Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta pada tahun 2020 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.3 Strategi, Program dan Kegiatan

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN
Tertib administrasi kependudukan masyarakat meningkat	<b>Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	Pelayanan Identitas Penduduk
		Pelayanan Pindah datang dan pendataan Penduduk
	<b>Program Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	Pelayanan Kelahiran dan Kematian
		Pelayanan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan
	<b>Program Pengelolaan Informasi Administrasi</b>	Kerjasama dan Inovasi Pelayanan

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN
	Kependudukan dan Pemanfaatan Data	
		Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

## 2.2 Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2020

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
Tertib administrasi kependudukan masyarakat meningkat	Indeks tertib administrasi kependudukan	Persen	98,00

Selain melaksanakan perjanjian kinerja organisasi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta juga melaksanakan Perjanjian Kinerja Strategis untuk tingkat Kota Yogyakarta yaitu :

1. Data kependudukan yang dapat dijadikan database yang bersifat dinamis
2. Memunculkan inovasi baru
3. Berupaya meraih dan mempertahankan penghargaan nasional sesuai dengan bidang tugasnya
4. Mengutamakan rekanan yang memiliki NPWP Kota Yogyakarta
5. Memberi penghargaan bagi kelurahan dan kecamatan yang terbaik administrasi kependudukannya.

Pada tahun 2020, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tidak melaksanakan Perubahan target Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Perubahan hanya pada penambahan anggaran untuk mendukung pencapaian target kinerja berupa pengadaan sarana prasarana pelayanan administrasi kependudukan.

### 2.3 Rencana Anggaran Tahun 2020

Pada Tahun Anggaran 2020 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp7.644.092.000,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp2.469.870.000,- dan Belanja Langsung Rp5.174.222.000,-. Melalui mekanisme perubahan APBD 2020 menjadi Rp. 5.101.826.500,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp 2.484.940.000,- dan Belanja Langsung Rp 2.616.886.500,-

#### 2.3.1 Target Belanja

Tabel 2.5 Target Belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta APBD Perubahan Tahun 2020

Uraian	Target	Prosentase
Belanja Tidak Langsung	Rp. 2.484.940.000,-	48,71%
Belanja Langsung	Rp. 2.616.886.500,-	51,29%
Jumlah	Rp. 5.101.826.500,-	100 %

#### 2.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2020 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6 Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis

No.	Sasaran	Anggaran	Prosentase	Keterangan
1	2	3	4	5
	Tertib administrasi kependudukan masyarakat meningkat	Rp. 5.101.826.500,-	100 %	-

## BAB 3

# AKUNTABILITAS KINERJA

### Bab 3 Berisi :

1. *Capaian Kinerja Tahun 2020*
2. *Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis*
3. *Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya*
4. *Realisasi Anggaran*
5. *Inovasi*

### 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2020

Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta merupakan bentuk pertanggung jawaban kinerja secara transparan yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang dijanjikan pada tahun 2020.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dari hasil pengukuran selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	$\leq 50$	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya. Sasaran kinerja yang akan dicapai adalah :



### SASARAN

Tertib administrasi kependudukan masyarakat meningkat

Sasaran yang akan dicapai Indikator kinerja sasaran dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
Tertib administrasi kependudukan masyarakat meningkat	Indeks tertib administrasi kependudukan	98,00%	99,77 %	101,80%

Pada tahun 2020, indikator indeks tertib administrasi kependudukan mencapai 99,77 persen dari target sebesar 98,00 persen artinya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan sebagai indikator tertib adminduk tercapai 99,77 persen dari warga Kota Yogyakarta atau tercapai 101,80 persen dari yang ditargetkan. Sesuai dengan skala peringkat kerja maka capaian atas tertib administrasi kependudukan tahun 2020 termasuk dalam kriteria sangat baik.

### 3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Dalam sub bab ini akan disajikan evaluasi pencapaian sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Sasaran tertib administrasi kependudukan masyarakat meningkat diukur dengan indikator Indeks tertib administrasi kependudukan dengan formula indikator sebagai berikut :

Tabel 3.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA INDIKATOR SASARAN	RINCIAN FORMULA INDIKATOR SASARAN	
Tertib administrasi kependudukan masyarakat meningkat	Indeks tertib administrasi kependudukan	50% penerbitan dokumen kependudukan + 50% penerbitan dokumen pencatatan sipil	Penerbitan Dokumen Kependudukan	Persentase penduduk ber KTP dan Persentase penduduk memiliki Kartu Keluarga
			penerbitan dokumen pencatatan sipil	Persentase kepemilikan dokumen kutipan akta kelahiran dan Persentase kepemilikan dokumen kutipan akta kematian

Adapun dari masing-masing formula indikator sasaran dibuat rumus pengukurannya. Rumus perhitungan dan hasil perhitungan masing formula indikator serta tingkat capaian terhadap target dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel 3.4 Perhitungan Kinerja berdasarkan Formulasi Indikator Capaian Tahun 2020

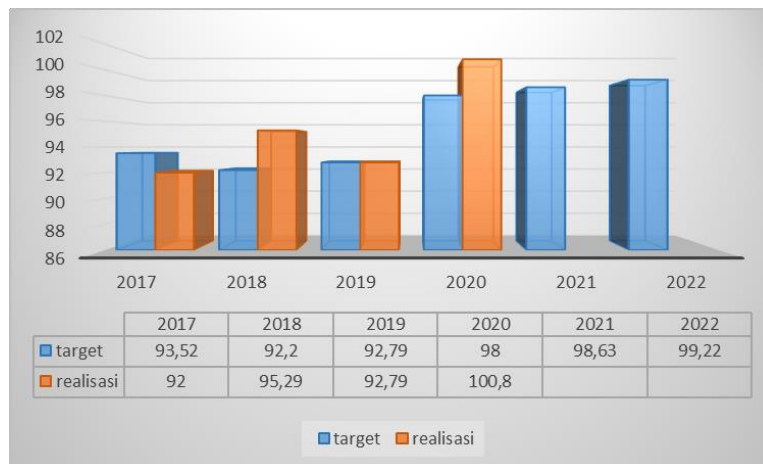
No	Nama Indikator dan Target 2020	Rumus Pengukuran	Perhitungan Capaian	Capaian	Tingkat capaian sasaran terhadap target 2020
1	Persentase penduduk ber KTP	$= \frac{\text{Jumlah Penduduk yang memiliki KTP}}{\text{Jumlah Wajib KTP}} \times 100\%$	$\frac{312.745 \times 100\%}{315.656} = 99,08\%$	$\frac{99,08+100}{2} = 99,54$	$(50\% \times 99,54) + (50\% \times 100) = 99,77\%$
2	Persentase penduduk memiliki Kartu Keluarga	$= \frac{\text{Jumlah KK yang dimiliki/diterbitkan}}{\text{Jumlah KK}} \times 100\%$	$\frac{139.771 \times 100\%}{139.771} = 100\%$		
3	Persentase kepemilikan dokumen kutipan akta kelahiran	$= \frac{\sum \text{Kutipan Kelahiran yang diterbitkan}}{\text{Jumlah Kelahiran Terjadi}} \times 100\%$	$\frac{4.218 \times 100\%}{4.218} = 100\%$	$\frac{100+100}{2} = 100$	
4	Persentase kepemilikan dokumen kutipan akta kematian	$= \frac{\sum \text{Kutipan Kematian yang diterbitkan}}{\text{Jumlah Kematian Terjadi}} \times 100\%$	$\frac{3.672 \times 100\%}{3.672} = 100\%$		

Dari perhitungan di atas terlihat bahwa tertib administrasi kependudukan di Kota Yogyakarta mencapai 99,77% hal itu ditinjau dari persentase kepemilikan KK dan KTP penduduk kota Yogyakarta dan penerbitan akta kelahiran bagi penduduk yang dilahirkan serta kepemilikan akta kematian bagi penduduk yang meninggal dunia. Bila capaian tersebut dibandingkan dengan target yang harus dicapai sebesar 98%, maka persentase capaian 101,80 % atau lebih dari 100% artinya capaian tertib administrasi kependudukan telah berhasil dengan tingkat capaiannya sangat baik seperti yang terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Indikator Sasaran	Realisasi	2020			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d th. 2020 terhadap target 2022 (%)
	2019	Target	Realisasi	%		
Indeks tertib administrasi kependudukan	92,79 %	98,00%	99,77%	101,80	99,25%	100,52

Dari tabel diatas juga dapat dicermati bahwa apabila realisasi tahun 2020 tersebut disandingkan dengan target pada akhir Renstra maka akan terapai 100,52 persen dari target sebesar 99,25 % sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini. Berikut digambarkan perkembangan capaian kinerja sasaran dalam 3 (tiga) tahun terakhir dibandingkan dengan target.



Gambar 3.1 Perkembangan Capaian Kinerja Sasaran dibanding Target

Selain kepemilikan dokumen kependudukan terdapat indikator tambahan terkait pemanfaatan data kependudukan yaitu persentase pemanfaatan data penduduk bagi perangkat daerah dan unit kerja di lingkungan pemerintah Kota Yogyakarta dengan realisasi tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 3.6 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Pemanfaatan Data Kependudukan Tahun 2020

No	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA INDIKATOR PROGRAM	Tingkat capaian program terhadap target 2020
1	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Persentase pemanfaatan data kependudukan	Jumlah OPD/Unit kerja berkerja sama pemanfaatan data dibagi Jumlah OPD/Unit di lingkungan Pemkot Yogyakarta X 100%	$\frac{91}{95} \times 100 \% = 95,79\%$ 107,14

Pada tahun 2020 terdapat 91 OPD/unit kerja dari target 95 OPD/unit kerja yang telah melaksan data atau 95,79%



Bila Capaian indikator kinerja dilihat per program adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7 Capaian Indikator Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Program	Indikator Program	Capaian 2020		
		Target %	Realisasi %	%
Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	99,75	99,54	99,79

Target capaian kinerja Program Pelayanan pendaftaran penduduk dengan indikator Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan pada tahun 2020 adalah sebesar 99,75% terealisasi sebesar 99,54% yang berarti target kinerja program tercapai 99,79% capaian ini termasuk dalam kriteria capaian **sangat baik**.

Adapun capaian indikator utama penerbitan akta kelahiran dan akta kematian menghasilkan pengukuran indikator kinerja program ke dua yaitu Persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil yang dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 3.8 Capaian Indikator Program Pelayanan Pencatatan Sipil

Program	Indikator Program	Capaian 2020		
		Target %	Realisasi %	%
Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil	96,25	100,00	103,896

Target capaian kinerja Program Pelayanan Pencatatan Sipil dengan indikator Persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil pada tahun 2020 adalah sebesar 96,25% terealisasi sebesar 100,00% yang berarti target kinerja program tercapai 103,89% capaian ini termasuk dalam kriteria capaian **sangat baik**.

Tabel 3.9 Capaian Indikator Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

Program	Indikator Program	Capaian 2020		
		Target %	Realisasi %	%
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Persentase pemanfaatan data kependudukan	89,47	95,79	107,14

Target capaian kinerja Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data dengan indikator Persentase pemanfaatan data pada tahun 2020 adalah sebesar 89,47% terealisasi sebesar 95,79% yang berarti target kinerja program tercapai 107,14% capaian ini termasuk dalam kriteria capaian **sangat baik**.

## **Analisis Keberhasilan pencapaian sasaran**

Adapun penunjang keberhasilan atau kegagalan atas capaian kinerja dimaksud adalah :

### **Faktor penghambat :**

1. Adanya pandemic covid 19 menyebabkan terganggunya layanan adminduk secara tatap muka baik yang dilaksanakan di dinas, kecamatan maupun kegiatan layanan jemput bola ke wilayah, tempat publik, sekolah.
2. Masih adanya anggapan di sebagian masyarakat bahwa pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil sulit dan lama.
3. Adanya masyarakat yang tidak dapat mengurus dokumen kependudukan karena tinggal di luar kota Yogyakarta untuk bekerja, sekolah dan lain-lain

### **Faktor penunjang keberhasilan :**

Telah dilaksanakan upaya-upaya meningkatkan kemudahan akses layanan adminduk / peningkatan pelayanan publik melalui upaya:

- Perubahan layanan dengan pembatasan layanan tatap muka ke layanan daring baik melalui WhatsApp, Jogja Smart Service (JSS) maupun layanan adminduk online berbasis web.
- Dengan layanan daring maka pelayanan di Kecamatan ditiadakan karena dengan layanan daring masyarakat cukup mengajukan permohonan dari rumah tidak perlu datang ke loket-loket layanan baik di dinas maupun kecamatan.
- Dalam pelayanan tatap muka yang terbatas diterapkan protokol kesehatan pencegahan penularan covid 19 di ruang layanan antara lain dengan pengukuran suhu tubuh, cuci tangan dengan sabun maupun handsanitizer, penggunaan masker, penyemprotan desinfektan dan pengaturan jarak antar pengunjung dan petugas.
- Dilakukan inovasi berupa layanan terintegrasi untuk meningkatkan kemudahan layanan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yaitu :
  - 1) Melaksanakan layanan drive thru yaitu layanan cetak KTP El dengan cepat + 3 menit di halaman parkir Balaikota dimana pemohon tidak perlu turun dari kendaraannya.
  - 2) Layanan Mantul (mante anyar Entuk Telu) yaitu layanan akta perkawinan, KK dan KTP El langsung diberikan oleh Petugas setelah pemohonan melaksanakan pernikahan di Gereja
  - 3) Layanan Kado Ananda yaitu layanan 3 in 1 akta kelahiran, KK dan Kartu Identitas Anak setelah Ibu melahirkan di Rumah sakit. Tiga dokumen langsung diberikan di Rumah Sakit
  - 4) Layanan 3 in 1 Kematian (SURAT LAYON) yaitu akta kematian, KK dan KTP El Janda/Duda yang diberikan petugas kepada ahli waris langsung pada saat Upacara Pemakaman
- Pendekatan pelayanan dengan cara jemput bola masih dilakukan secara terbatas yaitu panti-panti, lembaga pemasyarakatan, dan dari rumah ke rumah melalui kegiatan mobile KTP elektronik khusus bagi lansia dan penyandang keterbatasan fisik yaitu difabel dan sakit.

- Dalam pelayanan daring, seluruh dokumen kependudukan (KK, Akta-akta catatan sipil, surat pindah penduduk) disampaikan ke pemohon dalam bentuk file dokumen melalui e-mail. Adapun untuk KTP – elektronik dan KIA disampaikan ke pemohon melalui jasa pos.
- Selain itu dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan data kependudukan sekaligus meningkatkan kualitas data maka telah dilakukan kerjasama pemanfaatan data. Contoh penggunaan data kependudukan antara lain verifikasi data penduduk miskin, support data melalui data warehouse oleh Dinas Kominfo.

### 3.3. Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2020 sebesar 98,76% dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 62,82%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 37,18%. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program Pelayanan Pendaftaran Penduduk sebesar Rp1.120.957.000,00 (42,56%). Sedangkan penyerapan terkecil pada Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data di sasaran Rp218.404.440,00 (8,45%).

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2020 telah mencukupi. Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada table berikut:

Tabel 3.10 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tertib administrasi kependudukan masyarakat meningkat	Indeks tertib administrasi kependudukan	98%	99,77 %	101,81	2.616.886.500	2.584.532.056	98,76
<b>Jumlah</b>						2.616.886.500	2.584.532.056	98,76
<b>Total Belanja Langsung</b>						2.616.886.500	2.584.532.056	98,76

### 3.4. Akuntabilitas Anggaran

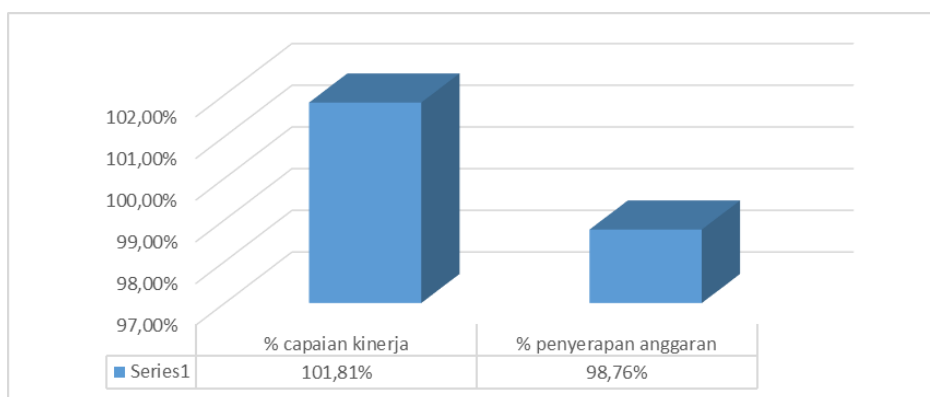
Tabel 3.11 Analisis efisiensi

No	Sasaran	Indikator	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6 = (5-4)
	Tertib administrasi kependudukan masyarakat meningkat	Indeks tertib administrasi kependudukan	101,81	98,76	3,05%

#### Analisis Efisiensi

Dari Sasaran strategis Tertib administrasi kependudukan masyarakat meningkat telah tercapai 100 % namun terdapat efisiensi dalam penggunaan anggaran sebagai berikut:

Bila capaian kinerja optimal diasumsikan berbanding lurus dengan penggunaan anggaran yang disediakan. Dengan capaian kinerja 101,81% dibutuhkan anggaran sebesar Rp2.616.886.500,-. Realisasi penggunaan anggaran tahun 2020 sebesar Rp2.584.532.056,- atau 98,76%. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi dalam penggunaan anggaran sebesar Rp32.354.444,- atau sebesar 3,05%



Gambar 3.2. Persentase Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran

### 3.5 Inovasi

Tantangan Global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparatur untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pada tahun 2020 terdapat permasalahan pandemic covid 19 sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menginisiasi beberapa inovasi yang dilaksanakan melalui:

#### 1. Inovasi dengan Pola Pendekatan pelayanan

##### a. Pelayanan Jemput bola dan pelayanan keliling

Pendekatan pelayanan dengan cara jemput bola selama pandemi covid 19 masih dilakukan secara terbatas yaitu panti-panti, lembaga pemasyarakatan, dan dari rumah ke rumah melalui kegiatan mobile KTP elektronik khusus bagi lansia dan penyandang keterbatasan fisik dan mental seperti lanjut usia, sakit, difabel dan sakit jiwa.



Gambar 3.3 Kegiatan Jemput Bola



Gambar 3.4 Perekaman KTP El Penduduk yang Mengalami Keterbatasan Fisik *door to door*



## b. Pelayanan Drive Thru



**Gambar 3.5 Layanan Drive Thru Cetak KTP El**

Pelayanan Cetak KTP Elektronik langsung di tempat dalam waktu 5 menit, pemohon dilayani di atas kendaraannya.

## 2. Inovasi dengan pola layanan berbasis on line

### a. Pelayanan On Line

Pelayanan On Line dilakukan dengan aplikasi On Line Adminduk berbasis Web dan Pelayanan Daring berbasis android dengan WhatsApp dan JSS. Pelayanan On line tersebut telah dilengkapi dengan pengesahan dokumen menggunakan Tanda Tangan Elektronik (TTE). Hal ini sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring.

Jenis dokumen yang telah ditandatangani secara elektronik meliputi:

1. Biodata Anak berdasarkan Kepemilikan Akta Kelahiran (BAKAK),
2. Biodata Penduduk WNI,
3. Kartu Keluarga WNI,
4. Akta Kelahiran,
5. Akta Kematian,
6. Akta Pengakuan Anak,
7. Akta Pengesahan Anak,
8. Akta Perceraian,
9. Akta Perkawinan,
10. Surat Keterangan Pindah WNI,
11. Biodata Penduduk Orang Asing,
12. Surat Keterangan Tempat Tinggal (Orang Asing pemilik KITAS),
13. Kartu Keluarga Orang Asing (pemilik KITAP),
14. Surat Keterangan Perekaman KTP-el,
15. Akta Kelahiran bagi Anak Tanpa Asal Usul,
16. Surat Keterangan Lahir Mati WNI, dan
17. Surat Keterangan Lahir Mati WNA.
18. Surat Keterangan Pindah Orang Asing

*Sekilas Layanan Adminduk On Line*

**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**  
**LAYANAN AMINDUK online**  
*"Klik di rumah anda dapat akta"*

<https://sipakjogja.simda.net>

- Merupakan pelayanan on line bagi bagi penduduk ber KTP Kota Yogyakarta untuk pengurusan dokumen kependudukan (adminduk).
- Jenis dokumen adminduk yang dilayani secara on line :
  - Pembuatan akta kelahiran,
  - Pembuatan akta kematian,
  - Pembuatan akta perkawinan,
  - Pembuatan akta percerahan
  - Pembuatan surat keterangan pindah penduduk.
  - Dowload formulir permohonan
- Melalui sistem layanan on line ini masyarakat dapat melakukan proses pendaftaran pelayanan adminduk di manapun berada asal terhubung ke internet.
- Sistem ini merupakan alternatif pelayanan yang ditawarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk memberikan kemudahan, kecepatan dalam mengakses layanan adminduk.

**MEKANISME – PELAYANAN ADMINDUK ON LINE**

**Step 1**  
**PENDAFTARAN ON LINE**

1. Pemohon melakukan registrasi.
2. Setelah registrasi diterima silakan pilih menu layanan dan mengisi formulir permohonan.
3. Masukkan kelengkapan berkas persyaratan dan kirim secara digital pada menu yang tersedia.
4. Mengisi form permohonan pelayanan sesuai pilihan secara on line.

**Step 2**  
**PEMERIKSAAN BERKAS ON LINE OLEH PETUGAS**

1. Setelah pendaftaran dan berkas persyaratan diterima secara on line oleh petugas akan dilakukan pemeriksaan.
2. Jika data dan berkas lengkap dan benar akan diproses lebih lanjut.
3. Bila data dan berkas tidak lengkap dan tidak benar maka akan ada pemberitahuan untuk memperbaiki.

**Step 3**  
**PENYERAHAN DOKUMEN KEPADA PEMOHON**

1. Dokumen adminduk diterbitkan dan disahkan.
2. Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta membawa berkas persyaratan yang telah dikirim secara on line.
3. Penyerahan dokumen adminduk kepada pemohon

**DINDUKAPIL KOTA YOGYAKARTA** Team Media Promo Dindukapil Kota Yogyakarta

Dalam upaya pencegahan penyebaran **Covid-19**,  
**Layanan Adminduk Kota Yogyakarta**  
 dibatasi melalui layanan tatap muka, tetapi dioptimalkan melalui Layanan Online menggunakan:



Juga Smart Service dapat di download di Google Play Store



Layanan Via Whatsapp Melalui Nomor :  
 0821 3758 9077 (KK, KTP, KIA, Mutasi Penduduk)  
 0851 5647 4750 (Akta-akta Pencatatan Sipil)



Konsultasi Melalui Nomor :  
 0274 557082 (Pendaftaran Penduduk & Pencatatan Sipil)  
 0274 587480 (Data)

f Dindukapil Kota Jogja
ig dindukapilkotajogja
tw @dindukapilkotaj
yt Dindukapil Kota Jogja

**DINDUKAPIL KOTA YOGYAKARTA** Team Media Promo Dindukapil Kota Yogyakarta

**LAYANAN VIA WHATSAPP**


**0821 3758 9077**  
 (KK, KTP, KIA, Mutasi Penduduk)  
**0851 5647 4750**  
 (Akta-akta Pencatatan Sipil)

**Dengan format :**

Nama :  
 NIK :  
 No KK :  
 Keperluan :

Dan melampirkan (meng upload) semua persyaratan

f Dindukapil Kota Jogja
ig dindukapilkotajogja
tw @dindukapilkotaj
yt Dindukapil Kota Jogja

**Gambar 3.6 Informasi Layanan on-line**

Kepengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil melalui layanan on line ini, masyarakat dapat mengajukan permohonan melalui aplikasi berbasis web dan mengirimkan semua berkas permohonan secara digital. Pada saat dokumen telah selesai dicetak maka masyarakat akan mendapatkan notifikasi bahwa dokumen telah dapat diambil.



berlaku tanggal 27-Jul-2020

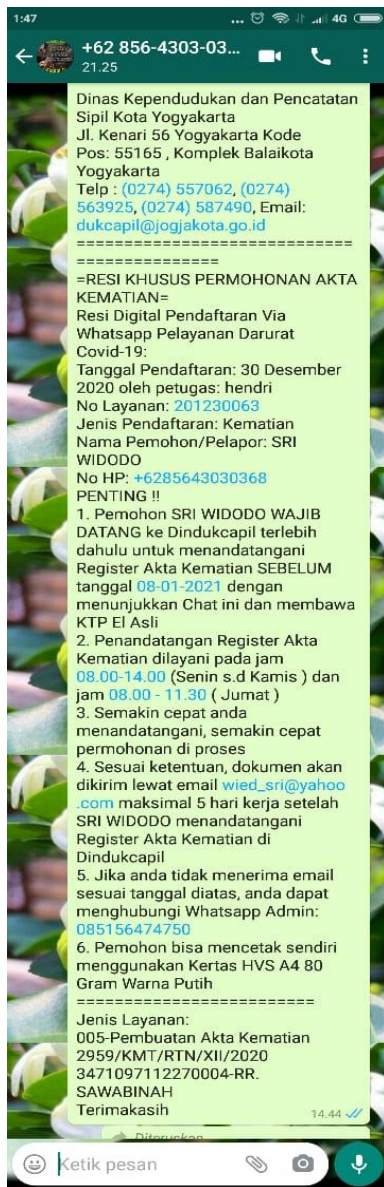
2. Jika anda menginginkan layanan Dindukcapil lain, anda dapat menghubungi petugas melalui Whatsapp
3. Anda Terdaftar dengan Nomor Urut: 1
4. Silahkan Chat Ke Petugas Loker 1 dengan klik link [wa.me/62895418601040](https://wa.me/62895418601040)

PELAYANAN LOKET Whatsapp di hari kerja:  
 Senin - Kamis : jam 08.00 - 14.00  
 Jumat : jam 08.00 - 11.30  
 Pastikan Bpk/Ibu/Sdr mengirimkan foto dokumen dengan lengkap sebelum jam pelayanan tersebut. Jika diluar jam pelayanan loket tersebut, Anda harus mendaftar antrian kembali di nomer WA Admin Pendaftaran Pencatatan Sipil.

ATAU bisa copykan info dibawah ini lalu paste dan kirim ke nomer wa: 62895418601040

Copy Isian

Token:200727KGJK  
 Tgl Daftar:2020-07-27 08:42:31  
 Nama Pemohon:Slamet Riyadi  
 NIK Pemohon:3471100309750001  
 Email:anieksinger@gmail.com  
 No HP:085228015959  
 WA:085228015959  
 Keperluan:mohon diterbitkan akta kematian Bapak kandung saya bernama Hadi Suprpto.  
 Urutan Daftar:1  
 Loker Tujuan: Loker 1

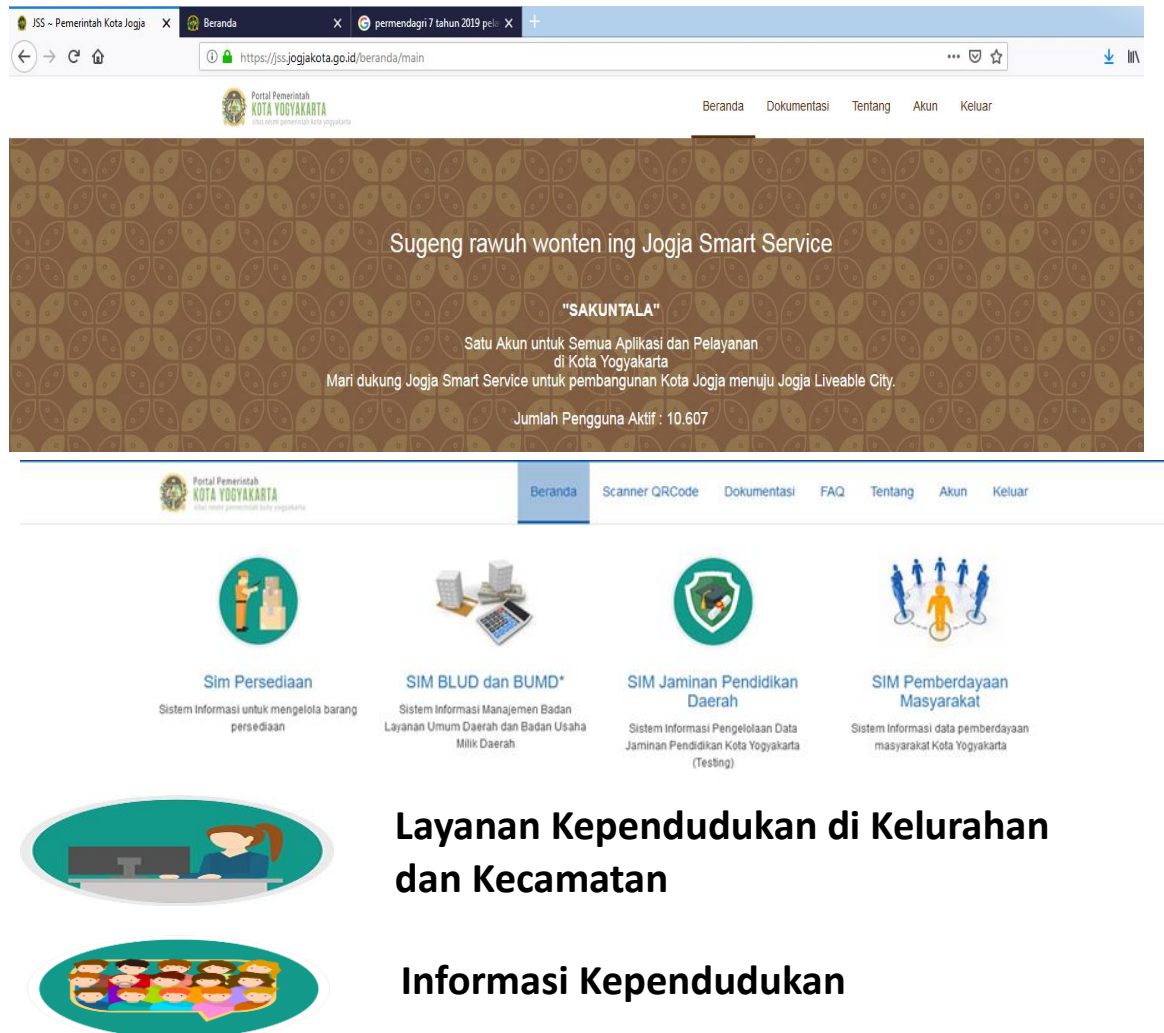


Gambar 3.7 Informasi ke masyarakat



## b. Pelayanan Kelurahan dan Kecamatan Melalui *Jogja Smart Service* (JSS)

Masyarakat yang akan menggunakan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dilaksanakan di tingkat kelurahan dan kecamatan dapat mengakses melalui aplikasi Pemerintah Kota Yogyakarta pada *Jogja Smart Service* (JSS) di menu Pelayanan Kelurahan dan Kecamatan yang dapat diakses melalui *smart phone*.



Gambar 3.8 Layanan Administrasi Kependudukan di *Jogja Smart Service*

## 3. Inovasi dengan Pola Pelayanan Paket/Terpadu

### a. Layanan Mantul (manten anyar Entuk Telu)

Layanan Mantul yaitu layanan akta perkawinan, KK dan KTP El langsung diberikan oleh Petugas setelah pemohonan melaksanakan pernikahan di Gereja



Gambar 3.9 Layanan 3 in 1 Akta Perkawinan

- b. **Layanan Kado Ananda** yaitu layanan 3 in 1 akta kelahiran, KK dan Kartu Identitas Anak setelah Ibu melahirkan di Rumah sakit. Tiga dokumen langsung diberikan di Rumah Sakit



Gambar 3.10 Proses Layanan 3 in 1 Akta Kelahiran

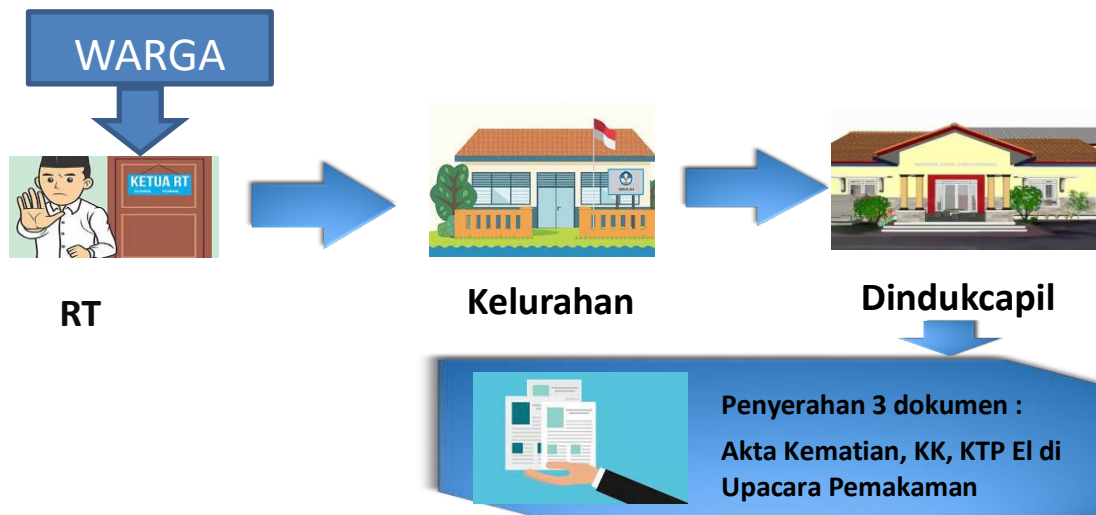
Paket pelayanan ini meliputi akta kelahiran, Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Identitas Anak (KIA) yang diserahkan di Rumah Sakit Mitra yang sudah bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta. Dokumen diserahkan ibu selesai melahirkan, dengan demikian masyarakat menjadi lebih mudah dalam mengurus dokumen kependudukan anggota keluarga yang baru dilahirkan. Terdapat 18 (delapan belas) RS Mitra yang telah bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- c. **Pelayanan Serat Layon**

Pelayanan percepatan paket layanan 3 in 1 akte kematian

Paket pelayanan ini meliputi akta kematian, Kartu Keluarga (KK) dan KTP EI.

Pelayanan ini di tahun 2020 telah dilaksanakan di 45 kelurahan. Melalui program ini akte kematian dicetak dengan cepat rata-rata dalam 1 (satu) hari dan diserahkan pada saat upacara pemakaman.



Gambar 3.11 Proses Layanan 3 in 1 Akta Kematian

#### 4. Sosialisasi dengan berbagai media elektronik dan non elektronik

Untuk mendukung berbagai inovasi dilakukan berbagai sosialisasi melalui media elektronik dan non elektronik antara lain :

Berbagai leaflet disebarakan melalui Whats App







Gambar 3.12 Pengumuman Pelayanan Publik

Pola pelayanan administrasi kependudukan berbasis teknologi informasi dan internet juga dilaksanakan untuk memberikan kemudahan dan kecepatan bagi masyarakat, terlebih dalam masa pandemi covid-19 saat ini.

Selain itu dalam rangka meningkatkan kualitas data layanan supaya pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil berjalan dengan lancar maka perlu didukung database yang berkualitas, antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bekerjasama dengan Pengadilan Negeri dan Kementerian Agama untuk perubahan biodata penduduk akibat perkawinan dan putusan pengadilan lainnya yang berdampak pada perubahan biodata penduduk.

Kegiatan Sosialisasi kepada masyarakat juga dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan prosedur, mekanisme dan manfaat kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Materi Sosialisasi mencakup:

- Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat kepemilikan Kartu Keluarga, KTP El, akte kelahiran, dan akta kematian.
- Meningkatkan pemahaman masyarakat atas persyaratan dan mekanisme pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil
- Sosialisasi Adminduk tentang penggantian blanko kependudukan dan pencatatan sipil berupa kertas HVS 80 gram. Hal ini juga dalam rangka mencegah penyebaran covid-19 sehingga topik yang diangkat adalah “Di rumah aja, dokumen adminduk beres!!!”

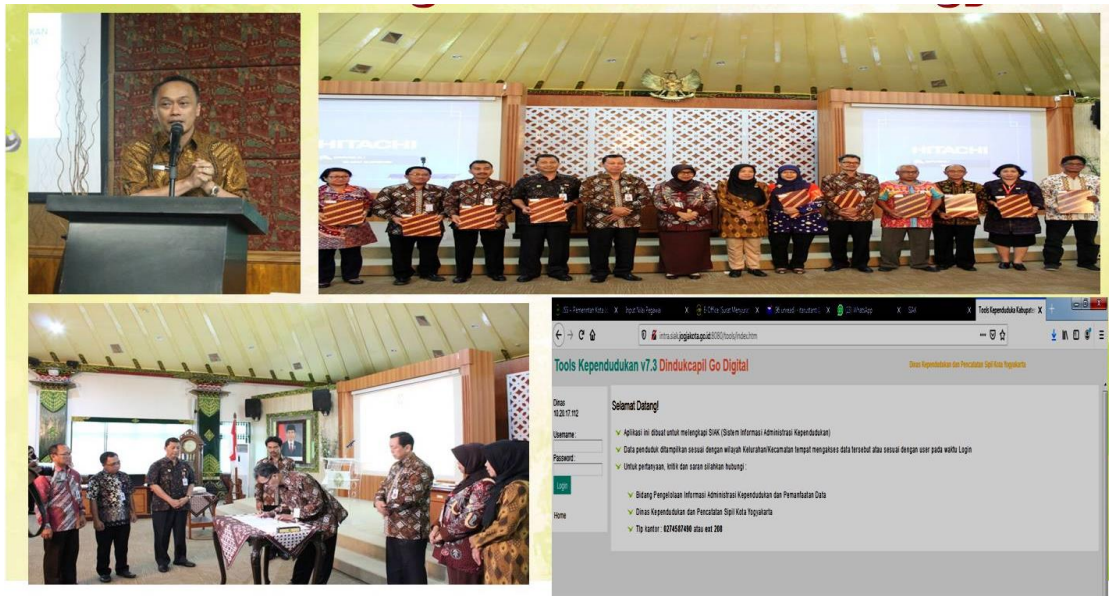
Pelaksanaan sosialisasi diantaranya melalui tayangan “angkringan” di stasiun televisi milik pemerintah (TVRI Jogja) dan membuat acara podcast/ siaran audio internet yang dikonsumsi oleh kalangan muda berupa sebuah perbincangan yang terstruktur dan jelas arahnya untuk menambah pengetahuan tentang konten tertib adminduk.



Gambar 3.13 Sosialisasi di Media Elektronik

Selain inovasi yang berdampak langsung pada capaian kinerja, maka sesuai ketentuan yang berlaku, data kependudukan di Kota Yogyakarta juga telah digunakan dalam: pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi; dan penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

Sebagai landasan hukum pemanfaatan data pada tahun 2020 telah dilaksanakan perjanjian kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan 50 OPD, 41 unit kerja/kelurahan dan 1 OPD akses data warehouse (Dinas Kominfo) di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.



Gambar 3.14 Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan

Melalui upaya-upaya tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendapat penghargaan di Tingkat Provinsi dan Nasional antara lain :

- ❑ Tahun 2020 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta menjadi nominasi dalam ROLE MODEL Penyelenggaraan Pelayanan Publik dari Kementerian PAN dan RB tingkat Nasional sejak tahun 2016.
- ❑ Tahun 2020 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta mendapat penghargaan dari Kementerian PAN dan RB sebagai unit kerja pelayanan berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)



Gambar 3.15 Penghargaan WBK

- ❑ Tahun 2020, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta juga meraih penghargaan juara 2 atas Hasil Penilaian Audit Kearsipan.



## BAB 4

# PENUTUP

### ***Bab 4 Berisi :***

- 1. Kesimpulan*
- 2. Rencana Tindak Lanjut*

#### **4.1. Kesimpulan**

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2020 merupakan tahun keempat dari Rencana Strategis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tahun 2020 dapat disimpulkan sebagai berikut:

Dari analisis 1 sasaran, dengan 1 indikator kinerja utama yang dipilih sebagai tolak ukur. Pada tahun 2020 indikator yang ditetapkan sudah memenuhi target dengan tingkat capaian sebesar 101,80%. Tercapainya target disebabkan oleh berbagai faktor penunjang.

#### **4.2. Rencana Tindak Lanjut**

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut:

1. Memperluas sosialisasi sistem layanan online yang telah diterapkan
2. Meningkatkan keamanan system pelayanan online dengan menghapus system permohonan melalui WA dan beralih sepenuhnya menggunakan system layanan melalui jogja smart service (jss) dan aplikasi berbasis web.
3. Meningkatkan kerja sama layanan adminduk dengan stakeholder terkait lainnya seperti Rumah Sakit, KUA, dll.
4. Mengajukan permohonan penambahan SDM ke BKPP yang semakin berkurang akibat mutasi, promosi maupun purna tugas.

# LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran 1. Struktur Organisasi

Lampiran 2. Perencanaan Strategis (matriks Renstra lima tahun)

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Lampiran 4. Pengukuran Kinerja Tahun 2020

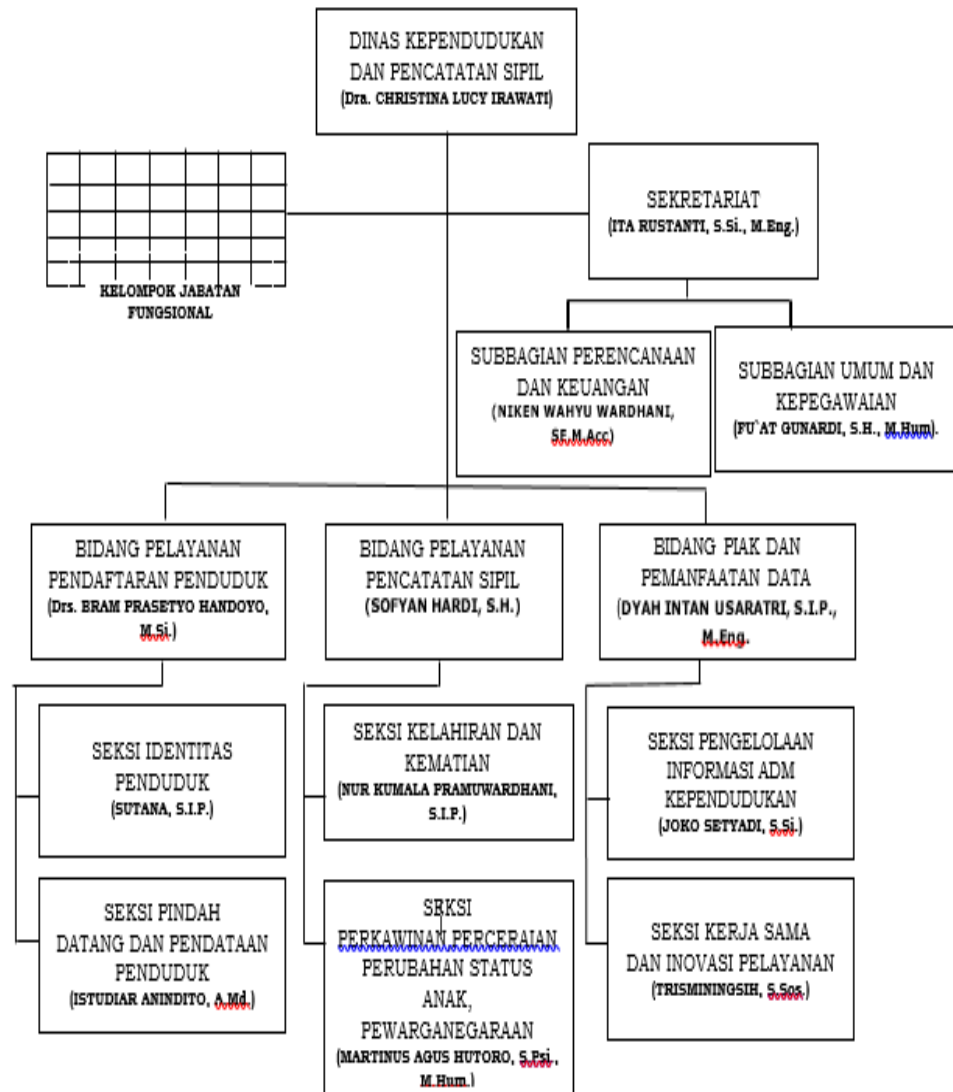
Lampiran 5. Rencana Aksi Tahun 2020

Lampiran 6. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKJ IP Tahun Sebelumnya

Lampiran 7. Penghargaan yang pernah diterima

Lampiran 1. Struktur Organisasi

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA YOGYAKARTA



Lampiran 2. Perencanaan Strategis (matriks Renstra lima tahun)

Matriks Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD									
No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	<b>Sasaran</b>								
	Indeks tertib administrasi kependudukan	93,52	93,52	92,20	92,79	98,00	98,63	99,25	99,25
2	<b>Program</b>								
	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	98,75	98,75	99,24	99,54	99,75	99,75	99,75	99,75
	Persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil	88,29	88,29	85,16	86,04	96,25	97,50	98,75	98,75
	Persentase pemanfaatan data kependudukan	52,63	52,63	52,63	86,32	89,47	94,74	100	100

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2020



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 563925, 567062, 567490

EMAIL : kependudukan@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.jogjakota.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : H. SISRUWADI, SH., M.Kn.

Jabatan : KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : H. HARYADI SUYUTI

Jabatan : WALIKOTA YOGYAKARTA

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab saya.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, 27 Januari 2020

Pihak Kedua,  
  
H. HARYADI SUYUTI

Pihak Pertama,  
  
H. SISRUWADI, SH., M.Kn.  
NIP. 19620204 198903 1 020

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KOTA YOGYAKARTA**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tertib Administrasi Kependudukan Masyarakat Meningkat	Indeks Tertib Administrasi Kependudukan	98,00 %

Program		Anggaran	Keterangan
1.	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Rp. 2.535.302.000	APBD Dan DAK
2.	Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Rp. 632.681.000	APBD Dan DAK
3.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Rp. 360.232.000	APBD Dan DAK

Yogyakarta, 27 Januari 2020

Wakil Wali Kota Yogyakarta



**H. HARYADI SUYUTI**

Kepala  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan  
Sipil Kota Yogyakarta



**H. SISRUWADI, SH, M.Kn**  
NIP. 19620204 198903 1 020



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 563925, 557062, 587490

EMAIL : [kependudukan@jogjakota.go.id](mailto:kependudukan@jogjakota.go.id).

HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : [upik@jogjakota.go.id](mailto:upik@jogjakota.go.id)

WEBSITE : [www.jogjakota.go.id](http://www.jogjakota.go.id)

**REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dra. CHRISTINA LUCY IRAWATI

Jabatan : KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : H. HARYADI SUYUTI

Jabatan : WALIKOTA YOGYAKARTA

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab saya.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta,

2020

Pihak Kedua,  
  
H. HARYADI SUYUTI

Pihak Pertama,  
  
Dra. CRISTINA LUCY IRAWATI  
NIP. 19610422 198603 2 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KOTA YOGYAKARTA**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tertib Administrasi Kependudukan Masyarakat Meningkat	Indeks Tertib Administrasi Kependudukan	98,00 %

Program		Anggaran	Keterangan
1.	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Rp. 2.535.302.000	APBD Dan DAK
2.	Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Rp. 632.681.000	APBD Dan DAK
3.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Rp. 360.232.000	APBD Dan DAK

Yogyakarta,

2020

Walikota Yogyakarta



**H. NARYADI SUYUTI**

Kepala  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan  
Sipil Kota Yogyakarta



**Dra. CHRISTINA LUCY IRAWATI**  
NIP. 19610422 198603 2 004





PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Kenari No. 55 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 563825, 557052, 557490  
EMAIL : [kependudukan@jogjakota.go.id](mailto:kependudukan@jogjakota.go.id)  
HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : [upik@jogjakota.go.id](mailto:upik@jogjakota.go.id)  
WEBSITE : [www.jogjakota.go.id](http://www.jogjakota.go.id)

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dra. CHRISTINA LUCY IRAWATI

Jabatan : KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : H. HARYADI SUYUTI

Jabatan : WALIKOTA YOGYAKARTA

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab saya.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, 12 NOV 2020

Pihak Kedua,  
  
H. HARYADI SUYUTI

Pihak Pertama,  
  
Dra. CHRISTINA LUCY IRAWATI  
NIP. 19610422 198603 2 004



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KOTA YOGYAKARTA**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tertib Administrasi Kependudukan Masyarakat Meningkat	Indeks Tertib Administrasi Kependudukan	98,00

Program		Anggaran	Keterangan
1.	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Rp. 1.120.957.000	Perubahan APBD Dan DAK Tahun 2020
2.	Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Rp. 307.081.000	Perubahan APBD Dan DAK Tahun 2020
3.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Rp. 221.497.000	Perubahan APBD Dan DAK Tahun 2020

Yogyakarta, 12 Mei 2020

Wakil Wali Kota Yogyakarta  
  
**HARYADI SUYUTI**

Kepala  
 Dinas Kependudukan dan Pencatatan  
 Sipil Kota Yogyakarta

  
**MUSTINA LUCY IRAWATI**  
 NIP. 19610422 198603 2 004

Lampiran 4. Pengukuran Kinerja Tahun 2020

SIM Pelaporan Pengendalian Pembangunan

[https://simpelaporan.jogjakota.go.id/index.php/laporan/pengukuran\\_kinerja/cetak/4/2020](https://simpelaporan.jogjakota.go.id/index.php/laporan/pengukuran_kinerja/cetak/4/2020)

**PENGUKURAN KINERJA  
PERANGKAT DAERAH  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Cara Pengukuran Indikator Sasaran	Triwulan IV		Keterangan	Program	Pagu	Triwulan IV		Keterangan
					Realisasi	%				Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Tertib administrasi kependudukan masyarakat meningkat	Indeks tertib administrasi kependudukan	98,00 %	(50% penerbitan dokumen kependudukan+ 50% penerbitan dokumen pencatatan sipil) dikali 100	99,96 %	102,00	Faktor Pendorong: upaya-upaya berupa perubahan layanan sehingga meningkatkan kemudahan akses layanan adminduk selama pandemi covid 19. Faktor penghambat: Adanya perubahan rencana kegiatan layanan jemput bola ke wilayah, tempat publik, sekolah karena masih adanya pandemi covid 19	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1.120.957.000,00	1.099.944.760,00	98,13	
								Program Pelayanan Pencatatan Sipil	307.081.000,00	305.302.900,00	99,42	
								Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	221.497.000,00	218.404.440,00	98,60	
Faktor Pendorong: Adanya regulasi yang mendukung situasi pandemi covid dengan layanan daring sehingga pelayanan adminduk tetap berjalan dengan lancar												
Uraian Permasalahan: Adanya perubahan rencana kegiatan layanan jemput bola ke wilayah, tempat publik, sekolah karena masih adanya pandemi covid 19												
Rencana Tindak Lanjut:												



Lampiran 5. Rencana Aksi Tahun 2020

SIM Pelaporan Pengendalian Pembangunan https://simpelaporan.jogjakota.go.id/laporan/raperkin/cetak/2020/undefined

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

PERANGKAT DAERAH : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
TAHUN : 2020

No	Sasaran	Indikator	Target 2020				Program/Kegiatan/Keluaran	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target 2020				Anggaran
			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Tertib administrasi kependudukan masyarakat meningkat	Indeks tertib administrasi kependudukan	97,38 %	97,59 %	97,79 %	98,00 %	<b>Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan</b>	99,59 %	99,64 %	99,69 %	99,75 %	2.535.302.000
							<b>Pelayanan Identitas Penduduk</b>		76,50 %	82,45 %	95,90 %	100,01 %	1.053.309.000
							Jumlah Pemberian Dokumen KK/KTP-el bagi Perseorang SKOT	20.00 orang	32,00 %	42,00 %	67,00 %	100,00 %	702.000
							Jumlah Lokasi Pelaksanaan Mobile KTP-el untuk Lansia dan Keterbatasan Fisik	22.00 kelurahan	20,00 %	88,00 %	97,00 %	100,00 %	8.574.000
							Sekolah Dasar yang dikunjungi Pelayanan Mobile KIA	10.00 Sekolah	69,00 %	76,00 %	100,00 %	100,00 %	3.225.000
							Laporan Pemilahan dan Penyusutan Arsip Adminduk	1.00 laporan	26,00 %	52,00 %	73,00 %	100,00 %	52.944.600
							Pembentukan Kelurahan GISA ( Gerakan Indonesia Sodar Adminduk)	53.00 Kampung	31,00 %	50,00 %	76,00 %	100,00 %	447.533.400
							Pengalasan Blangko/Formulir Pendaftaran Penduduk	1.00 jenis	15,00 %	26,00 %	100,00 %	100,00 %	343.780.000
							Pelayanan Perekamian KTP-el bagi pelajar SLTA	15.00 sekolah	50,00 %	54,00 %	100,00 %	100,00 %	2.775.000
							Pengalasan Ribbon dan Cleaning Kit, HDP film	6.00 jenis	97,00 %	98,00 %	100,00 %	100,00 %	1.376.460.000
							<b>Pelayanan Pindah Datang dan Pendataan Penduduk</b>		22,43 %	54,12 %	81,00 %	100,00 %	67.648.000
							Evaluasi Pelaksanaan Pindah Datang Penduduk	5.00 laporan	22,00 %	59,00 %	82,00 %	100,00 %	57.948.000
							Diseminasi Informasi rentan Adminduk	50.00 orang	25,00 %	25,00 %	75,00 %	100,00 %	9.790.000
							<b>Program Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	<b>Persentase Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil</b>	88,59 %	91,14 %	93,69 %	96,25 %	632.681.000
							<b>Pelayanan Kelahiran dan Kematian</b>		20,46 %	64,12 %	98,25 %	100,00 %	241.809.600
							Percepatan Pelayanan Akta di Wilayah	22.00 Kelurahan	23,00 %	60,00 %	98,00 %	100,00 %	289.709.400
							Pengalasan Dokumen Security Printing dan Non Security Pencatatan Sipil	2.00 jenis	0,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	197.538.600
							Kerjasama Lintas Sektor Pelayanan Pencatatan Kelahiran dengan Rumah Sakit	15.00 Rumah Sakit	25,00 %	55,00 %	98,00 %	100,00 %	57.600.000
							<b>Pelayanan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak, Dan Pewarganegaraan</b>		25,00 %	49,98 %	79,11 %	100,00 %	65.272.000
							Cetak Blangko Pelayanan Perkawinan dan Perceraian	4.00 Jenis	24,99 %	49,98 %	91,63 %	100,00 %	5.010.800
							Sinkronisasi Data Perkawinan dari KUA menggunakan SIAK Tahun 1996 sampai dengan Tahun 2006	11.00 Laporan	25,00 %	49,98 %	78,07 %	100,00 %	60.261.200
							<b>Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data</b>	<b>Persentase pemanfaatan data kependudukan</b>	86,32 %	86,32 %	86,32 %	86,32 %	360.232.000
							<b>Kerjasama dan Inovasi Pelayanan</b>		13,29 %	21,10 %	60,91 %	99,99 %	58.990.000

## RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

PERANGKAT DAERAH : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
TAHUN : 2020

Laporan Inovasi pelayanan administrasi kependudukan	1.00 Laporan	13.00 %	21.00 %	57.00 %	100.00 %	<b>18.050.000</b>
Jumlah Kerjasama Administrasi Kependudukan	2.00 jenis	16.00 %	22.00 %	97.00 %	100.00 %	<b>15.775.000</b>
Sosialisasi Adminduk	1.00 kali	13.00 %	21.00 %	57.00 %	100.00 %	<b>76.010.000</b>
Publikasi Media Elektronik	1.00 kali	13.00 %	21.00 %	57.00 %	100.00 %	<b>66.800.000</b>
<b>Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>		<b>49,04 %</b>	<b>75,96 %</b>	<b>85,65 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>162.597.000</b>
Penyusunan Profil Kependudukan	1.00 File	46.00 %	75.00 %	100.00 %	100.00 %	<b>8.113.000</b>
Fasilitas Sarana dan Prasarana Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	15.00 titik	50.00 %	76.00 %	85.00 %	100.00 %	<b>170.551.000</b>
Frekuensi Bimbingan Teknis PIAK	2.00 kali	20.00 %	75.00 %	100.00 %	100.00 %	<b>4.933.000</b>



Lampiran 6. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKJ IP Tahun Sebelumnya



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos: 55165 Telp. (0274) 514448, 515865, 515866, 562682 E MAIL:  
dukcapil@jogjakota.go.id. HOT LINE SMS: 08122780001 E MAIL: upik@jogjakota.go.id WEB  
SITE: www.jogjakota.go.id

**TANGGAPAN/TINDAK LANJUT EVALUASI LKJ IP TAHUN SEBELUMNYA**

**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta**

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1	Mengkoordinasikan pengusulan perubahan indikator kinerja sasaran sehingga dapat menggambarkan kinerja seluruh seksi yang ada di Dinas	Sudah dilaksanakan, disarankan untuk pengajuan perubahan pada awal tahun 2020
2	Memerintahkan secara tertulis kepada Bendahara Pengeluaran dan PPKom untuk menyertakan bukti belanja sesuai ketentuan yang berlaku	Sudah dilaksanakan
3	Dalam melaksanakan pembahasan anggaran bersama dengan Tim Anggaran didokumentasikan secara tertulis	Sudah dilaksanakan di sebagian pembahasan

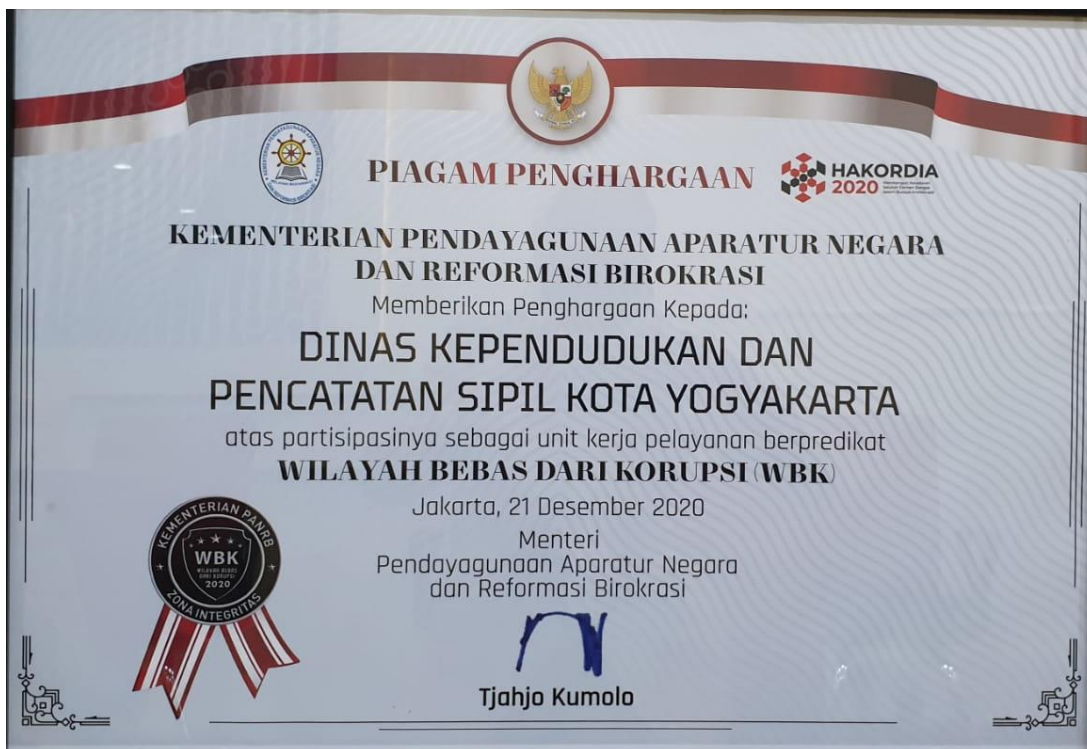
**Kepala**

**H. SISRUWADI, SH. M.Kn**  
**NIP. 19620204 198903 1 020**



## Lampiran 7. Penghargaan yang pernah diterima

- ❑ Tahun 2020 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta menjadi nominasi dalam ROLE MODEL Penyelenggaraan Pelayanan Publik dari Kementerian PAN dan RB tingkat Nasional sejak tahun 2016.
- ❑ Tahun 2020 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta mendapat penghargaan dari Kementerian PAN dan RB sebagai unit kerja pelayanan berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)



- ❑ Tahun 2020, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta juga meraih penghargaan juara 2 atas Hasil Penilaian Audit Kearsipan.